

## **STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN**

Susie Perbawasari, Evi Novianti  
Program Studi Ilmu Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi,  
Universitas Padjadjaran Bandung  
susieperbawasari@yahoo.com

### **Abstrak**

Penelitian ini berjudul "Strategi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Sektor Pariwisata di Kabupaten Pangandaran". Pangandaran merupakan salah satu obyek wisata andalan kabupaten Pangandaran dan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendapatan asli daerah. Sebagai kawasan andalan nasional dan kawasan wisata unggulan di Jawa Barat, kawasan Pangandaran dan sekitarnya disiapkan untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata nasional dan internasional yang mempunyai daya saing dan berbasis masyarakat yang mampu mengoptimalkan sumber daya alam untuk menjamin peningkatan kesejahteraan pelaku ekonomi dengan tanpa merusak lingkungan dan nilai-nilai budaya setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan dan cara mengomunikasikan strategi pemerintah kabupaten Pangandaran, serta untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten Pangandaran dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Penelitian dilaksanakan di kabupaten Pangandaran.

Kata kunci: ekonomi kerakyatan, pariwisata, sosialisasi, strategi komunikasi

### **Abstract**

*This study titled "strategy Pangandaran District Government in the Development of People's Economy Through Tourism Sector in the District Pangadaran". Pangandaran is one of the mainstay tourism Pangadaran district and has contributed significantly to revenue. As a national key region and the leading tourist area in West Java, Pangandaran and surrounding areas prepared to be developed as a tourist destination that has a national and international competitiveness and enable optimum community-based natural resources to ensure improved welfare of economic agents without damaging the environment and values local cultural values. The purpose of this study was to determine how the planning and to communicate these strategies Pangadaran district government, and to investigate the barriers or constraints faced by the district government Pangadaran in developing democratic economy through the tourism sector. This research uses descriptive method. Data collection techniques were interviews, observation, and literature study. This research was conducted in the district Pangadaran.*

*Keywords: populist economics, Tourism, socialization, communication strategy*

## PENDAHULUAN

Pangandaran merupakan kabupaten di tenggara provinsi Jawa Barat yang memiliki berbagai potensi kepariwisataan. Beberapa objek wisata unggulan di kawasan ini sudah dikenal luas, bahkan hingga mancanegara, antara lain objek wisata Pantai Pangandaran, Cagar Alam Pananjung, Pantai Batu Hiu, Pantai Batu Karas, Pantai Madasari, Citumang, serta Cukang Taneuh atau yang lebih populer dengan sebutan *Green Canyon*. Objek-objek wisata tersebut selalu dibanjiri pengunjung tiap masa liburan datang.

Sebagai kawasan andalan nasional dan kawasan wisata unggulan di Jawa Barat, kawasan Pangandaran dan sekitarnya disiapkan untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata nasional dan internasional yang mempunyai daya saing dan berbasis masyarakat yang mampu mengoptimalkan sumber daya alam dengan menerapkan IPTEK untuk menjamin peningkatan kesejahteraan pelaku ekonomi dengan tanpa merusak lingkungan dan

nilai-nilai budaya setempat. Upaya peningkatan pariwisata di kawasan Pangandaran lebih diintensifkan terutama mengenai kelengkapan sarana dan prasarananya.

Pangandaran merupakan salah satu obyek wisata andalan kabupaten Pangandaran dan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendapatan asli daerah, tetapi meskipun memberikan kontribusi yang signifikan, Pangandaran tidak terlepas dari sejumlah faktor masalah. Pada tanggal 17 Juli 2006, Pangandaran dan sejumlah wilayah pesisir selatan pantai pulau Jawa terkena bencana gempa bumi dan tsunami. Tidak hanya korban jiwa, sebagian besar fasilitas pendukung fisik wisata seperti hotel, wisma, *homestay*, *bungalow* dan rumah makan mengalami kerusakan parah. Bahkan kawasan ini merupakan daerah yang mengalami bencana paling parah.

Pengertian ekonomi kerakyatan dan ekonomi rakyat, lebih makro secara sosiologis dapat dikatakan adalah suatu paham ekonomi yang lebih menghendaki

pertumbuhan ekonomi seiring dengan pemerataannya, meski pengertian ekonomi kerakyatan merupakan istilah yang relatif baru waktu itu, yang dipopulerkan untuk menggantikan ekonomi rakyat itu sendiri.

Dengan demikian pengertian konsep ekonomi kerakyatan adalah perekonomian atau perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang berkembang relatif lambat, sesuai dengan kondisi yang melekat pada kelompok masyarakat tersebut. Sedangkan sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat kedalam proses pembangunan. Ideologi dasar konsep ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat sesuai dengan pasal 33 ayat 1 dan sila ke-empat Pancasila.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh

rakyat kebanyakan (populer) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Secara ringkas Konvensi ILO169 tahun 1989 memberi definisi ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah mereka secara turun temurun.<sup>1</sup>

Pembangunan yang berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

---

<sup>1</sup><https://succesary.wordpress.com/2008/12/10/sistem-ekonomi-kerakyatan/> diakses tgl 25 Oktober 2015

Dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep, ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat

Menurut Badan Pusat Statistik (2007) Kegiatan pariwisata sungguh memberi peranan berarti terhadap keseluruhan kinerja perekonomian Indonesia. Tahun 2007 menunjukkan dampaknya berupa nilai produksi total Rp 362,10 triliun, yang berarti 4,62 persen dari total produksi nasional Rp 7.840,57 triliun. Menghasilkan nilai tambah sektoral Rp 169,67 triliun atau 4,29 persen dari PDB Indonesia yang bernilai Rp 3.957,40 triliun. Mempekerjakan 5,22 juta orang sama dengan 5,22 persen dari lapangan kerja nasional yang 99,93 juta orang. Upah dan Gaji dihasilkan berjumlah Rp 53,88 triliun sama dengan 4,43 persen dari total upah nasional

yang berjumlah Rp 1.216,83 triliun. Atau menghasilkan pajak Rp 6,31 triliun yang berarti 4,09 persen dari total penerimaan pajak nasional Rp 154,31 triliun.

Di era otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah bisa mewujudkan kemandiriannya dalam hal pengelolaan pariwisata di daerah masing-masing berupa memberikan kekuasaan penuh dalam mengelola sumber daya yang ada, menentukan sebuah program yang cocok, mengutamakan seluruh aparat daerah sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing sehingga pelayanan yang diberikan menghasilkan hasil yang sangat maksimal kepada masyarakat.

Peranan pemerintah dalam pengembangan pariwisata daerah ini sangatlah penting. Ini dikarenakan sektor pariwisata dalam pembangunan daerah mencakup dua aspek penting, yaitu aspek ekonomis karena sebagai sumber pendapatan panambahan devisa, aspek sosial yaitu membuka lapangan pekerjaan baru.

Pengembangan pariwisata tidak akan menjadi optimal pada suatu sektor jika hanya dikuasai oleh pengusaha pribadi yang mana keuntungan yang didapat hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Sedangkan sektor pariwisata ini selalu didominasi oleh peran masyarakat. Hal ini tentu tidak mungkin dalam pengembangan yang hanya melibatkan kepentingan pribadi atau satu pihak saja. Sehingga pengembangan pariwisata yang berbasis kerakyatan harus menjadi landasan dan acuan yang dilakukan harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat disekitarnya dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh mereka. Strategi ini diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian masyarakat yang pada akhirnya dapat mempercepat pemulihan ekonomi secara nasional.

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi

sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Effendy, 2004:300).

Keinginan pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandiriannya perlu diberikan kewenangan penuh, terutama dalam mengelola sumber daya yang ada, menentukan kebijakan sendiri, memprioritaskan seluruh aparatur daerah agar mempunyai profesionalisme yang bagus dan dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) dapat berbeda sewaktu-waktu bergantung dari situasi dan kondisi (Effendy, 2004:301).

Pangandaran dengan sejumlah potensi pariwistanya tentu berdampak positif terhadap kesejahteraan dan perekonomian masyarakatnya. Karena itu dalam penelitian ini ingin memfokuskan pada bagaimana strategi pemerintah kabupaten pangandaran dalam pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Surya Wirawan (2009) dengan judul "Pengembangan Daya Tarik Wisata Bahari Secara Berkelanjutan Di Nusa Lembongan Kabupaten Klungkung" Sumber daya atau potensi wisata yang dimiliki di kawasan pesisir di Pulau Nusa Lembongan adalah sebagai berikut: (1) Panorama alam pantai yang menawan dengan hamparan

pasir putih, ombak yang baik untuk para peselancar; (2) Khasanah dan keunikan alam bawah laut; (3) hutan bakau (*mangrove*); (4) Karang pantai (*clift*) di pesisir barat Nusa Lembongan (*dreambeach*); (5) Hamparan budidaya rumput laut; (6) kehidupan komunitas nelayan; (7) Fasilitas akomodasi, dan fasilitas lain di kawasan Nusa Lembongan.

Penelitian Surya Wirawan membahas tentang bentuk pengembangan daya tarik wisata bahari di Nusa Lembongan, peran *stakeholder* dalam pengembangan daya Tarik wisata bahari di Nusa Lembongan dan manfaat pengembangan daya Tarik wisata bahari bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.

Hasil penelitian Surya Wirawan menunjukkan, bahwa bentuk pengembangan daya Tarik wisata bahari Nusa Lembongan adalah menitikberatkan pada penataan dan pengembangan infrastruktur dasar, diversifikasi aktivitas dan paket wisata serta fasilitas sanitasi yang mengacu pada ketentuan lingkungan dan berkelanjutan yaitu

dengan merancang system zonasi yang dibagi ke dalam beberapa daerah peruntukan (*zoning*), yaitu: Zona Inti (Zona Konservasi Alam), Zona Buffer (Zona Penerimaan), Zona Pengembangan (Zona Aktivitas Wisata).

Penelitian Surya Wirawan adalah pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan, tetapi sama-sama menuju pariwisata alam, dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya lokal. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian Surya Wirawan dilakukan pada objek wisata yang sedang berkembang, dan berfokus pada paket wisata bahari, sedangkan penelitian ini berlokasi pada objek yang baru akan dikembangkan dan tidak hanya berfokus pada wisata bahari tetapi wisata alam, wisata budaya, wisata religi dan spiritual.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan situasi atau peristiwa

atau penelitian observasional seperti yang dikemukakan oleh Wood (1997, dalam Rahmat, 2004:25). Lebih jauh Rahmat mengemukakan bahwa penelitian deskriptif ditujukan untuk: (1) mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, (3) membuat perbandingan atau evaluasi, (4) menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang (Rahmat, 2004:25).

Metode pemilihan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara purposif. Sumber data yang digunakan disini tidak sebagai sumber data yang mewakili populasinya, tetapi mewakili informasi. Berdasar kepada akses tertentu yang dianggap memiliki informasi yang berkaitan dengan permasalahan secara mendalam dan dapat dipercaya sebagai sumber yang mantap (Spardley : 1997:40).

Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan studi pustaka yang relevan dengan tema yang di usung. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Humas, Kasubag Protokoler dan Kasubag Sandi dan Telekomunikasi serta Kasubag Dokumentasi dan Informasi Pemerintahan Kabupaten Pangandaran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Strategi menurut Chrisience strategi adalah pola-pola berbagai tujuan serta kebijaksanaan dasar dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh perusahaan. Demikian juga sifat perusahaan baik sekarang maupun yang akan datang. Strategi merupakan semacam ilmu untuk berperang para jenderal dalam membuat sebuah rencana untuk memenangkan perang tapi sekarang banyak digunakan oleh lembaga publik maupun nir laba. Dengan demikian strategi merupakan pengembangan dari misi dan tujuan yang

hendak dicapainya organisasi itu dengan lingkungannya, sehingga strategi merupakan hasil dari respon organisasi terhadap tantangan mendasar yang dihadapi. Dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal. Dimana masing-masing faktor saling berhubungan satu sama lainnya. Biasanya strategi ini akan dikembangkan sebagai respon terhadap isu strategis, tetapi strategi itu mungkin pula dikembangkan untuk mencapai sasaran atau visi keberhasilan. (Chrisience C. Roland dan R.A Supriyono: 1986: 9)

Pada perencanaan ini dilihat aspek-aspek yang terdapat dalam proses komunikasi yaitu penentuan komunikator, bagaimana pesan yang akan disampaikan, media yang dipergunakan serta sasaran yang ingin dicapai. Untuk pengembangan perekonomian rakyat terdapat beberapa program yang pembicaranya langsung dari kementerian pariwisata dan industri dan perdagangan, ada juga komunikatornya yang diminta dari dinas pariwisata yang didelegasikan ke



bidang yang terkait yaitu bidang koperasi dan UMKM.

Pada perencanaan ini dilihat tugas pokok bagian humas yaitu menyelenggarakan penyusunan, perumusan kebijakan pengumpulan dan pengolahan informasi penyebarluasan informasi, dokumentasi, pelaksanaan kegiatan dan acara bersifat protokoler, penyelenggaraan persandian dan peralatan sandi tingkat kabupaten. Perencanaan ini merupakan fungsi bagian hubungan masyarakat yang dimulai dari :

1. Penyusunan dan perencanaan kebijakan pengumpulan, pengolahan informasi dan penyebarluasan informasi serta dokumentasi.
2. Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan informasi sebagai bahan kebijakan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah;
3. Pelaksanaan penyebarluasan informasi penyelenggaraan dan pengembangan Pemerintah Daerah;
4. Penyelenggaraan dokumen-

tasi hasil liputan dan penyebarluasan informasi;

5. Penyelenggaraan acara/ kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah yang bersifat protokoler;
6. Penyelenggaraan persandian, sistem dan alat sandi telekomunikasi;
7. Penyusunan Laporan Kegiatan di bidang tugasnya;

Perencanaan menurut Sukarsa (1999) adalah proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, untuk itu dapat berubah-ubah menurut tempat, waktu dan keadaan. Dalam pembangunan pariwisata suatu perencanaan yang baik sangat diperlukan sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal sesuai tujuan yang dimaksud. Perencanaan pariwisata merupakan proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan masa depan suatu destinasi atau atraksi wisata.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pangandaran khususnya Dinas Pariwisata mempunyai perencanaan pengembangan pantai Pangandaran sebagai central wisata pantai di Jawa Barat dengan menggunakan strategi baik melalui media massa, internet maupun menggunakan saluran komunikasi lokal berdasarkan kebiasaan dan budaya lokal masyarakat setempat.

Salah satu strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran adalah melalui sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai media. Mulai dari media massa, cetak dan lain.

Begitu juga strategi komunikasi ini merupakan paduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen (*management communication*) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-

waktu, bergantung kepada situasi dan kondisi (Effendy, 2004:32).

Salah satu strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah agar program kerja Pemerintah dapat melekat di masyarakat maka melalui metode sosialisasi yang efektif. Pengertian sosialisasi yaitu proses dimana manusia belajar melalui cara, nilai, dan menyesuaikan tindakan dengan masyarakat dan budaya, melihat bagaimana manusia meningkatkan pertumbuhan pribadi mereka agar sesuai dengan keadaan, nilai, norma dan budaya sebuah masyarakat tersebut yang berlaku di sekelilingnya melalui, merasi (*feeling*), dan percayadiri dari proses sosialisasi dibudayakan sepanjang hayat.

Kebijakan pemerintah di sosialisasikan melalui media. Media cetak yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran yaitu melalui surat kabar yakni Pikiran Rakyat, Kabar Tasikmalaya, Koran Sindo, Pangandaran News. Selain itu mereka juga menggunakan saluran komunikasi lainnya yaitu memanfaatkan saluran komunikasi yang ada dimasyarakat.

Pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahap yang sulit karena melibatkan banyak pihak atau aktor yang kemungkinan berbeda kepentingan dan aspirasinya. Untuk mengetahui sejauh mana suatu pelaksanaan kebijakan pemerintah itu mencapai tujuannya (efektif) maka perlu dicarikan faktor penyebab yang mempengaruhi atau menentukan berhasil tidaknya suatu pelaksanaan kebijakan, yang oleh Irfan Islamy (1998 : 98) disebut syarat-syarat pelaksanaan kebijakan, syarat-syarat tersebut ada 4 (empat) macam yaitu :

1. Isi kebijakan: Isi kebijakan yang akan dilaksanakan dapat mempersulit pelaksanaannya dengan berbagai cara, pertama-tama samarnya isi kebijakan yaitu tidak terperinci tujuan-tujuan, sarana-sarana, dan penetapan prioritas program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
2. Informasi kebijakan: Pelaksanaan suatu kebijakan memperkirakan atau yang terlibat langsung mempu-

nyai informasi yang perlu untuk dapat memainkan perannya dengan baik.

3. Dukungan kebijakan: Pelaksanaan suatu kebijakan akan sangat dipersulit jika para pelaksana tidak cukup dukungan untuk kebijakan, karena disini terkait kepentingan pribadi dan tujuan pelaksana, juga pengharapan-pengharapan tentang efektifitas sarana yang dipilih, keunggulan situasi masalah, latar belakang historis, tradisi dan kebiasaan rutin serta pendapat mengenai cara bagaimana pelaksanaan diorganisasi.
4. Pembagian potensi kebijakan: Mencakup tingkat diferensiasi tugas dan wewenang, masalah koordinasi, terutama jika kepentingan terwakili sangat berlainan, timbulnya masalah pengawasan ataupun timbulnya pergeseran tujuan, struktur organisasi pelaksana kebijakan, bila pembagian wewenang dan tanggung jawab

kurang disesuaikan dengan pembagian tugas, atau ditandai pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. (Islamy, 1998 : 98).

Suatu program kebijakan di sosialisasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Sosialisasi dipandang sebagai proses interaksi antara satu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan dimana di dalam sosialisasi kebijakan aktor, organisasi, prosedur, dan teknik di pakai secara bersama.

Selain dengan menggunakan saluran komunikasi melalui media, pemerintah Kabupaten Pangandaran juga menggunakan saluran budaya yang ada di masyarakat yaitu budaya lokal kearifan setempat.

Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran ternyata belum menunjukkan hasil yang memuaskan, dimana masyarakat masih banyak yang belum tahu mengenai kebijakan ekonomi kerakyatan yang

digemborkan oleh pemerintah setempat. Selain itu juga tujuan adanya kebijakan ini adalah membangun budaya masyarakat yang taat terhadap himbuan dan masyarakat dapat mengembangkan ekonomi kerakyatan berdasarkan potensi wisata pantai.

Kendala yang dihadapi oleh pemerintahan kabupaten Pangandaran dalam menyosialisasikan adalah keterbatasan tingkat pendidikan masyarakat serta budaya masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan sosialisasi tidak terlepas dari berbagai hambatan-hambatan dan rintangan. Untuk itu ada beberapa hambatan dalam sosialisasi yakni sebagai berikut:

- Kemampuan berbahasa; Orang yang pandai berbahasa mempunyai kecenderungan dapat dengan mudah melaksanakan sosialisasi. Sebaliknya apabila sulit berbahasa, sulit pula berkomunikasi.
- Cara terbentuknya sosialisai sangat ditentukan oleh pergaulan. Orang yang pandai bergaul

dan bisa menempatkan dirinya akan mudah menjalankan proses sosialisasi. Sebaliknya orang yang sulit berkomunikasi, bersikap kaku, kurang beretika dan cenderung menghambat sosialisasi. Kendala-kendala dalam bergaul, di antaranya sebagai berikut: Perbedaan golongan, Perbedaan status, Perbedaan pendidikan, Perbedaan sosial ekonomi.

- Kehidupan masyarakat yang terisolir
- Kesulitan dalam melakukan komunikasi
- Hambatan alam
- Adanya perbedaan kelakuan antara satu individu dengan individu lain
- Perubahan dalam masyarakat akibat modernisasi
- Terjadinya kesenjangan kebudayaan antar kelompok masyarakat.

Salah satu bentuk pendekatan yang dilakukan menurut Pa Kasi Kop & UMKM Pangandaran adalah melalui pembinaan yang dilakukan melalui bimbingan teknis.

Sasaran pelatihan adalah pelaku-pelaku usaha, pelaku usaha maju jadi kelompok usaha, dari kelompok usaha terpetakan prakoperasi, kemudian dilegalitaskan menjadi koperasi.

Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi, yaitu, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang. Maka, kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera. Inilah pembangunan generasi mendatang sekaligus memberikan jaminan sosial bagi mereka yang paling miskin dan tertinggal.

Selanjutnya menurut kasi UMKM, sesuai rencana bintek yang digelar di provinsi ada pelatihan kewirausahaan, isinya mengenal tentang cara-cara berwirausaha, ternyata memang di sini bukan sedikit yang bisa dikelola dijadikan bisnis cuma belum terbuka, belum tau, seperti dari kelapa bukan hanya untuk sayur atau buat seperti getek, diolah jadi obat, ada satu koperasi yang menjalankannya.

Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Pangandaran partisipasi masyarakat kurang terhadap koperasi yang dibentuk oleh pemerintah. Menurut kasi perdagangan, masyarakat banyak meminjam modal ke koperasi yang dibentuk tetapi ketika belanja mereka lebih menyukai ke mall mall modern seperti indomart, alfamart.

## **Simpulan dan Saran**

### **Simpulan**

1. Salah satu strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah agar program kerja Pemerintah dapat melekat di masyarakat maka melalui metode sosialisasi yang efektif. Sosialisasi di

lakukan media massa, internet maupun menggunakan saluran komunikasi lokal berdasarkan kebiasaan dan budaya lokal masyarakat setempat.

2. Pembinaan ekonomi kerakyatan oleh dinas Pariwisata melalui bimbingan teknis melalui pelatihan pelatihan kewirausahaan yang menghasilkan koperasi yang dikelola oleh masyarakat sendiri.
3. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Pangandaran partisipasi masyarakat kurang terhadap koperasi yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat lebih mengandalkan pasar modern seperti minimarket.

## Saran

1. Sebaiknya pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan pembangunan minimarket yang akan mematikan pasar tradisional
2. Kebijakan mengenai ekonomi kerakyatan yang telah ditetapkan pemerintah provinsi dan kabupaten sebaiknya ditingkatkan kembali dalam hal sosialisasi dan implementasinya sehingga masyarakat merasa memiliki dan mengaplikasikan program tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous (2004). Rencana Pengelolaan Taman Wisata Alam dan Cagar Alam Pangandaran. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat II. Ciamis
- Bryson J.M., Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial, Pustaka Belajar ( Anggota IKAPI), 1999
- Chrisience C. Roland dan R.A Supriyono, Strategi Pemasaran, BPEE, Yogyakarta, 1986,
- Djajadiningrat, Surna.T (1997). Pengantar Ekonomi Lingkungan .Jakarta : LP3ES.
- Data Potensi Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ciamis 2000 – 2010 .Kab. Ciamis: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- \_\_(2008). Report : Tourism Development Supporting Biodiversity Conservation in Pangandaran, Indonesia .WTO, Indecon, LWG, Pemkab Ciamis.
- Effendy, Onong Uchjana. 2004. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Cetakan kesembilanbelas. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Gunn, A.Clare (1988). Tourism Planning. Prancis : Taylor.
- Inskip, Edward (1991). Tourism Planning: An Integrated Sustainable Approach. New York : Van Nostrand Reinhold
- Islamy, M.Irfan, 1998, *Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Kebijakan Publik, FIA Univ. Brawijaya.
- Mill, Robert Christie, Alih Bahasa Sastro Tribudi. 2000. Tourism The International Business, Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Paturusi, Syamsul Alam. 2008. Perencanaan Kawasan Pariwisata. Denpasar: Universitas Udayana



- Rahmat, Jalaluddin. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdikarya
- Sairin, Sjafrin. (2002). *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*; Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Slamet, (1993). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta :Sebelas Maret University Press.
- Sukarsa.I.Made. (1999). *Pengantar Pariwisata*. Ujung Pandang: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Indonesia Timur.